

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Kedisiplinan aparatur sipil negara merupakan suatu fenomena yang menarik untuk dikaji, tidak hanya untuk mengkritik sebuah perilaku budaya aparatur sipil negara akan tetapi kedisiplinan aparatur sipil negara menggambarkan kualitas pelayanan dan juga perilaku birokrasi. Oleh sebab itu kedisiplinan aparatur sipil negara sudah banyak dikaji oleh penelitian penelitian terdahulu. Menurut (Iswandari & Amin, 2022) dengan metode penelitian kualitatif deskriptif terhadap objek penelitian lembaga pemerintahan di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, menjelaskan perilaku kedisiplinan aparatur sipil negara mempengaruhi etos kerja dan akan menghasilkan hasil pekerjaan yang baik. Disiplin tidak hanya dilihat melalui kedatangan tepat waktu ke tempat kerja dan pulang dari tempat kerja, akan tetapi dilihat dari perilaku aparatur sipil negara dalam menaati peraturan yang ada, disisi lain menurut (Kamaria & Engka, 2022) untuk meningkatkan sebuah pelayanan publik bisa menggunakan pedoman disiplin waktu, dimana disiplin waktu ini mengukur ketepatan waktu aparatur sipil negara di dalam melaksanakan tugasnya, dan juga mengukur waktu kehadiran ke tempat kerja. Sejalan dengan disiplin waktu, Menurut (Asri, 2019) Disiplin dalam bekerja dipengaruhi oleh beberapa indikator yaitu ketepatan waktu, tanggung jawab, dan menaati peraturan. Aparatur sipil negara datang ke tempat kerja dengan tepat waktu, tertib dan juga teratur hal tersebut bisa dikatakan dengan disiplin kerja yang baik. Kedisiplinan kerja juga dapat ditingkatkan melalui pemberdayaan pegawai, seperti membentuk pada keyakinan, kepercayaan, komunikasi, kredibilitas, dan akuntabilitas (Tahir, 2019). Pemberdayaan tersebut dapat menghasilkan pengalaman yang berharga dan juga pentingnya kedisiplinan (Yesufu, 2020).

Berangkat dari kedisiplinan kerja dapat mempengaruhi kinerja dan hasil pekerjaan aparatur sipil negara, tentunya banyak cara di dalam meningkatkan

kedisiplinan aparatur sipil negara. Menurut (Maimunah et al., 2019) terdapat faktor yang dapat meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara, antara lain pembinaan dalam peningkatan disiplin kerja ASN, menerapkan Absensi *Face Detector* (rekam wajah), dan melakukan penerapan pengawasan yang penuh. Meningkatkan kualitas aparatur sipil negara bisa dengan lebih menekankan aturan yang berlaku atau reward dan punishment terhadap aparatur sipil negara oleh para pimpinan sebuah lembaga (Makaduro, 2014). Dilihat dari kedua penelitian tersebut meningkatkan kedisiplinan kerja masih kurang di dalam penerapan pengawasan kedatangan aparatur sipil negara, dengan berkembangnya teknologi dan informasi bisa menggunakan sistem absensi yang berbasis rekam sidik jari dan rekam wajah, menurut (Anistia & Handayani, 2022) adanya pemanfaatan teknologi tersebut didalam sistem absensi tidak hanya sebagai pencatat kehadiran pegawai, akan tetapi bisa menjadi kontrol kehadiran yang dapat membantu mendisiplinkan aparatur sipil negara. Akan tetapi pada saat penggunaan alat tersebut masih saja terdapat kekurangan, seperti menyita banyak waktu saat akan melakukan absensi, menambah antiran dalam absensi dan tidak efisien.

Seiring dengan perjalanan waktu tentunya inovasi dalam program absensi telah mengalami kebaruan, salah satunya aplikasi absensi berbasis data dan smartphone. Aplikasi ini sudah diterapkan dalam absensi karyawan di swasta, menurut (Pangerang, n.d.) penggunaan absensi ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses absensi yang dilakukan atasan dan karyawan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Yani A & Rosyida S, 2022) yang menyebutkan sistem absensi dapat mempermudah sebuah perusahaan untuk dapat melihat jumlah kehadiran karyawan, kemudian hal tersebut juga meminimalisir kemungkinan kehilangan data berkaitan dengan absensi dan mempermudah dalam membuat laporan. Dengan sistem *database* semua catatan hadir dan pulang terekam dengan baik di dalam sistem tersebut.

Aplikasi absensi online ini membawakan pengaruh yang signifikan di dalam perkembangan kedisiplinan aparatur sipil negara, seperti hasil penelitian yang dilaksanakan oleh (Qotrunnada Oktariani et al., 2021) pada kedisiplinan pegawai di sekretariat daerah Kota Sukabumi yang menunjukkan bahwasanya

bahwa efektivitas aplikasi absensi online ini mampu memberikan dampak yang positif terkait dengan kedisiplinan pegawai terutama sesuai dengan penelitian di Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, akan tetapi aplikasi absensi di Kota Sukabumi ini masih butuh pengembangan dalam sistem validasi secara kompleks, sehingga rawan dalam melakukan manipulasi data absensi oleh pegawai aparatur sipil negara. Kemudahan yang di dapat saat melakukan absensi secara online tidak hanya didapati oleh aparatur sipil negara akan tetapi menurut (Qotrunnada Oktariani et al., 2021) kemudahan tersebut juga didapati oleh lembaga karena lembaga tersebut memiliki akses di dalam melihat kehadiran karyawan melalui data yang dihasilkan oleh mesin absensi, selain itu hal tersebut juga dapat untuk melihat pengajuan libur yang dilakukan oleh karyawan.

Penerapan aplikasi absensi berbasis online ini sudah diterapkan di berbagai lembaga pemerintah di berbagai daerah di Indonesia. Aplikasi absensi berbasis online memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai di lembaga pemerintah tersebut. Penerapan absensi online untuk pegawai negeri sipil di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, aplikasi tersebut berdampak pada peningkatan produktivitas pegawai di Dinas tersebut. Aplikasi absensi online di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara mampu menjadi kan motivasi bagi para pegawai untuk meningkatkan kualitas kerja dan tingkat kehadiran, karena aplikasi absensi online ini mampu menjadikan dasar pegawai untuk mendapatkan hadiah dan penghargaan berupa tunjangan dari tingkat kehadiran di aplikasi online ini (Dalimuthe, 2022). Kemudian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Kota Padang, implementasi absensi online mampu meningkatkan kedisiplinan bagi para pegawai di BKPSDM Kota Padang dengan baik dalam bagian komunikasi, sumber daya dan pengaturan pekerjaan(Enjeli, 2019) .

Di Sekretariat Kota Kendari juga menerapkan aplikasi absensi berbasis digital/online, di lembaga ini penerapan aplikasi absensi online sudah baik dalam meningkatkan profesionalitas dalam bekerja dan juga dalam mendisiplinkan pegawai, kehadiran pegawai dan kinerja pegawai menjadi optimal dalam menjalankan birokrasi. Peran dari aplikasi absensi online

berbasis online di Sekretariat Kota Kendari melihat pada ketepatan jam kerja, datang tepat waktu dan pulang sesuai waktu yang telah di tentukan, kemudian selalu memperhatikan presentasi kehadiran, serta meningkatkan kinerja pegawai(Ardiyanto et al., 2022). Di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palu, terdapat aplikasi absensi online yaitu E-Absen Hadirku, aplikasi ini mampu meningkatkan kedisiplinan ASN di BKPSDM Kota Palu secara efektif sesuai yang telah diharapkan (ASRIA, 2016). Kemudian di Kantor Cabang Bank BTN cabang Bandung juga menggunakan Aplikasi Absensi berbasis online yaitu *B-Gate*. Aplikasi ini efektif dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai di kantor cabang Bank BTN cabang dengan tingkat kedisiplinan pegawai yang tinggi, Absensi online *B-GATE* berpengaruh signifikan terhadap disiplin kerja besar pengaruh absensi online *B-GATE* sebesar 49,4%, sedangkan sisanya 50,6% dipengaruhi oleh variabel lain (Widyaningsih, 2020).

Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya pada masa pandemi covid juga mengawali penggunaan aplikasi absensi online, selain di gunakan sebagai inovasi dalam penggunaan teknologi dan informasi di lembaga birokrasi pemerintahan aplikasi ini mampu menjadi terobosan dalam peningkatan kedisiplinan di Kantor Imigrasi Kelas I di TPI Kota Surabaya. Walaupun aplikasi ini dapat digunakan dalam mengukur tingkat kehadiran akan tetapi aplikasi ini bisa menjadi perhitungan jam masuk dan pulang kerja dilihat dari masuk dan telatnya pegawai melakukan absensi yang kemudian akan dilakukan potongan tunjangan dalam kata lain bisa menjadi *reward dan punishment* pegawai di di Kantor Imigrasi Kelas I di TPI Kota Surabaya(Muhammad Arifin & Widiyarta, 2021).

Penggunaan aplikasi absensi berbasis online ini memiliki faktor kendala dalam penggunaannya di lembaga pemerintahan dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai. Untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai tidak serta merta di pengaruhi oleh aplikasi absensi berbasis online ini, peningkatan kedisiplinan harus dibarengi oleh kesadaran pegawai dan faktor budaya kerja di lembaga tersebut(Widyaningsih, 2020). Kendala yang lain dalam implementasi aplikasi absensi online ini juga di pengaruhi oleh penggunaan teknologi dan

informasi dalam aplikasi ini, seperti kendala dalam penyediaan server, dan dalam penggunaan aplikasi oleh pegawai (Muhammad Arifin & Widiyarta, 2021).

Meninjau dari penelitian terdahulu tersebut, bahwasanya penelitian ini meninjau efektivitas dari inovasi yang dilakukan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di Kota Malang yaitu Aplikasi absensi online SI-PRETI apakah mampu menunjukkan keefektifan dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai aparatur sipil negara di BKPSDM Kota Malang dan juga faktor kendala apa saja dalam pengimplementasian aplikasi absensi SI-PRETI di Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia .

2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Digital Government

Perkembangan ke arah kemajuan teknologi dan informasi mengharuskan di segala lini kehidupan untuk menerapkan teknologi dan informasi di dalamnya, salah satunya adalah di pemerintahan yaitu *digital government* atau *E-Government*. *Digital government* atau *E-Government* adalah Pemanfaatan teknologi informasi baik internet maupun non-internet, dalam menyediakan pelayanan yang lebih nyaman dan efisien terhadap warga dan organisasi atas informasi dan pelayanan pemerintah, hal ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan kepada publik yang diharapkan untuk menjalin komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dengan baik (Suharyana, 2017). Menurut *World Bank*, Digital government hadir di masyarakat meningkatkan akses dan penyampaian seluruh aspek layanan pemerintah untuk kepentingan masyarakat, sektor swasta, pegawai dan pemangku kepentingan lainnya dengan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, dunia usaha dan industri, memberdayakan masyarakat melalui akses terhadap informasi (Nugroho, 2016).

Selain pemanfaatan teknologi dan informasi, *Digital Government* atau *E-Government* merupakan sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, di mana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan, dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan keuangan pajak, retribusi,

karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem. *Sehingga E-Government* atau *Digital Government* adalah suatu sistem pemerintahan yang memanfaatkan teknologi dan informasi dalam menghubungkan antara pemerintah, swasta, karyawan, dan masyarakat guna mewujudkan sistem pemerintahan efektif dan efisien dalam bekerja dan melayani masyarakat.

Di Indonesia kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government terdapat pada “Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government”. Di dalam instruksi presiden ini pemanfaatan *e-government* terbagi menjadi 2 pemanfaatan antara lain:

- a) Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik;
- b) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Pemanfaatan tersebut harus dibarengi dengan upaya pembangunan infrastruktur yang mendukung teknologi dan informasi yang merata di seluruh Indonesia. Serta membangun sumber daya manusia yang menghuni untuk mengimplementasikan teknologi dan informasi di Indonesia (INDONESIA, 2004). Teknologi dan informasi sangat berperan penting di pemerintahan, teknologi dan informasi sangat membantu pemerintah di dalam tugasnya.

Digital government atau *E-Government* memiliki beberapa jenis antara lain. Menurut Indrajid (2016: 30-33) *government to government, government to business, government to citizen, serta government to employees* (V. Arief & Yuardani, 2018). Jenis *Digital Government* atau *E-Government* diuraikan antara lain (Nurita, 2016) :

- a) *Government To Citizens* (G-To-C)

Sebuah sistem yang dibuat oleh pemerintah untuk membangun dan menyebarkan berbagai teknologi informasi dengan tujuan utama meningkatkan hubungan interaktif. Dengan kata lain,

negara-negara maju percaya bahwa penerapan e-Government dengan baik akan secara signifikan meningkatkan kualitas hidup masyarakat suatu negara dan masyarakat dunia pada umumnya. Oleh karena itu, penerapannya di suatu negara tidak bisa ditunda melainkan harus ditanggapi dengan serius. Tujuan utama pemerintah membangun sistem ini adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui jaringan akses yang beragam sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses pemerintahannya untuk memenuhi kebutuhan layanannya. Layanan yang berbeda-beda setiap harinya.

b) *Government To Government (G-To-G)*

Sistem pemerintahan-ke-pemerintah dirancang untuk mendorong kolaborasi antar negara atau lembaga pemerintah dan mengatasi isu-isu terkait, seperti manajemen kebijakan perdagangan, hubungan sosial dan budaya, dan sebagainya.

c) *Government To Business (G-To-B)*

Bentuk pemberian layanan informasi kepada dunia usaha. Kelompok swasta seperti perusahaan swasta membutuhkan data dan informasi dari pemerintah. Selain itu, interaksi antara dunia usaha dengan organisasi pemerintah juga menyangkut hak dan kewajiban dunia usaha tersebut sebagai organisasi yang mencari keuntungan. (Li & Pustaka, n.d.).

d) *Government To Employees (G-To-E)*

Sistem ini diciptakan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pejabat pemerintah atau pegawai yang bekerja di organisasi tertentu sebagai PNS. Karena kinerja pegawai yang tinggi dapat sebagai dorongan besar terhadap produktivitas, pencapaian tujuan organisasi, dan posisi yang menguntungkan (Tetteh et al., 2019).

Jenis jenis E-Government tersebut merupakan upaya dalam memaksimalkan teknologi dan informasi di sistem pemerintahan. Selain dalam memaksimalkan tentunya terdapat aspek aspek yang lebih dibenahi. Sebuah sistem ada jika dijalankan dengan baik secara efisien dan efektif.

E-Government atau *digital government* yang efisien dan efektif merupakan impian bagi setiap pelaku dan pemangku kebijakan. Dalam mewujudkannya perlu sinergi yang baik dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, swasta, dan juga sumber daya dan infrastruktur yang memadai agar *digital government* mencapai ke efektivitasan dalam implementasinya.

2.2.2. Efektivitas Digital Government

Efektivitas menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Karena efektivitas merupakan suatu konsep yang luas, mencakup banyak faktor di dalam dan di luar organisasi. Organisasi cenderung menjadi entitas kompleks yang berupaya mengalokasikan sumber daya secara tepat untuk mencapai tujuan mereka. Pasolong (2007:4) menyatakan bahwa “efektivitas berasal dari kata “akibat” dan istilah tersebut digunakan sebagai hubungan sebab akibat. Efisiensi dapat dianggap sebagai sebab dan akibat dari variabel lain, efektivitas merupakan salah satu aspek produktivitas yang mengarah pada pencapaian kerja maksimal, khususnya pencapaian tujuan yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan tenggat waktu.

Robbins dalam Indrawijaya (2010:175) mengartikan efektivitas sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (metode). Pemilihan tersebut mencerminkan konstituen strategis, penilaian terhadap kepentingan dan standar hidup. Sedangkan Siagian dalam Indrawijaya (2010:175) menawarkan pengertian efisiensi dalam kaitannya dengan prestasi kerja, khususnya menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Artinya apakah melaksanakan suatu tugas dianggap baik atau tidak, terutama ketika menjawab pertanyaan bagaimana cara mengerjakannya dan berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk itu.

Menurut Subagyo (2000:12), efektivitas adalah kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam ranah manajemen dan organisasi, efektivitas merupakan konsep vital yang menjadi tolok ukur keberhasilan. Subagyo (2007) menawarkan landasan teoritis untuk memahami dan mengukur efektivitas, khususnya dalam konteks program,

kegiatan, dan organisasi. Teori efektivitas Subagyo menyoroti pentingnya kesesuaian antara output (hasil) dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Teori Subagyo menekankan empat dimensi fundamental yang saling terkait untuk menciptakan sebuah program, kegiatan, atau organisasi yang efektif. Dimensi-dimensi tersebut adalah (Muhammad Arifin & Widiyarta, 2021):

1. Ketepatan Sasaran Program:

Indikator ini berfokus pada program yang menyoroti kebutuhan dan permasalahan yang sebenarnya. Efektivitas dari sebuah program akan tercapai tujuan apabila sasaran yang akan dituju tepat dan selaras dengan tujuan program yang telah ditentukan. Penentuan sasaran yang kurang tepat akan berdampak pada program yang tidak efektif, meskipun sudah berhasil dengan mencapai output tertentu.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program menyoroti tentang pentingnya komunikasi dan sosialisasi dari program dengan secara efektif dengan melibatkan semua pihak yang bertanggung jawab akan program dengan menekankan sasaran program dan pemangku kepentingan. Sosialisasi yang cermat akan menunjang sebuah program dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat, sehingga mendorong kerja sama dan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

3. Tujuan Program

Pada indikator tujuan program mementingkan bahwasanya sebuah program harus memiliki tujuan yang jelas, terukur, dan dapat dicapai. Sebuah tujuan program yang jelas, terukur, dan dapat dicapai dapat memudahkan sebuah program dapat diawasi dan dapat di evaluasi. Kemudian sebuah program yang sistematis mampu mengukur *progres* yang sudah dicapai, apakah sudah sesuai dengan target yang dituju. Tujuan program yang tidak konkrit dapat mengakibatkan sebuah pengukuran efektivitas menjadi sulit dilakukan dan berpotensi menghambat pencapaian program.

4. Pengawasan Program

Pengawasan program menekankan pelaksanaan evaluasi dan monitoring program secara berkala. Monitoring program dapat memudahkan identifikasi sebuah kemajuan, hambatan, dan penyesuaian dari program tersebut. Sehingga program tersebut berpotensi untuk mencapai tujuan secara efektif. Sehingga program dapat dipastikan berjalan sesuai rencana dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Teori Efektivitas Subagyo menawarkan sebuah kerangka kerja yang berharga bagi para praktisi, manajer, dan pembuat kebijakan untuk mendesain program, kegiatan, dan organisasi yang efektif: Dengan mempertimbangkan keempat dimensi efektivitas, Subagyo memberikan panduan untuk merencanakan dan melaksanakan program yang lebih terarah dan berdampak.

Teori efektivitas ini lebih mementingkan proses evaluasi dan monitoring, karena sebuah proses evaluasi dan monitoring pada sebuah program mampu mengukur efektivitas dan menjadikan landasan untuk perbaikan kedepannya. Memperhatikan teori tersebut tentunya dapat disimpulkan dengan indikator sebagai berikut :

Untuk mengoperasionalkan variabel terhadap efektivitas aplikasi SI-PRETI dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai di BKPSDM Kota Malang terdapat indikator-indikator yang harus di penuhi, Indikator tersebut diambil melalui teori efektivitas menurut Subagyo (2000:12), yaitu efektivitas adalah kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan , indikator tersebut antara lain:

1. Ketepatan Sasaran Program

Pada Indikator tersebut merupakan sebuah target yang akan dicapai oleh pemerintah dan menjadi sasaran dari program, pada penelitian ini yaitu pegawai negeri sipil di BKPSDM Kota Malang

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program merupakan sebuah langkah awal di dalam menentukan sebuah keberhasilan program. Dimana kemampuan pemerintah dalam menyalurkan evaluasi program terhadap sasaran.

3. Tujuan Program

Tujuan program adalah harapan hasil yang akan dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan program pemerintah. Tujuan dapat menjadi pedoman dalam mencapai program yang diharapkan.

4. Pengawasan Program

Pengawasan program merupakan tindakan prosedur dalam memantau dan memonitoring sebuah program agar dapat diukur tingkat keberhasilan program tersebut (Muhammad Arifin & Widiyarta, 2021).



2.2.3. Fungsi *Digital Government*

Digital government atau *E-Government* memiliki fungsi yang sangat beragam dalam membantu pekerjaan pemerintah. Fungsi dari digital government antara lain sebagai media komunikasi, koordinasi, dan peningkatan standarisasi pelayanan kepada masyarakat (Antoni, D A Darius Muhammad & Muhamad, 2022). Pemanfaatan teknologi dan informasi mampu mempererat sistem kemasyarakatan dimana masyarakat untuk berinteraksi tidak harus bertemu, bisa berkomunikasi melalui media online (Topornin et al., 2021). Akan tetapi kualitas dari informasi tersebut harus berdasarkan data dan dengan dasar pengambilan keputusan (Mulyana, 2023). Di dalam pemanfaatan media komunikasi, dengan model penyampaian informasi dua arah yang semakin mudah tidak hanya antara pemerintah dan masyarakat tapi juga antara pemerintah dan pihak swasta atau pemerintah dan pemerintah. Hal ini merupakan salah satu bentuk inovasi strategi komunikasi yang tentunya bermanfaat dalam mendukung peran dan fungsi pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam bersama-sama membangun kehidupan nasional. Tentu saja manfaat yang paling dinantikan dari *e-Government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, dan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Pada dasarnya transformasi dibutuhkan bagi institusi pemerintahan dalam meninggalkan kebiasaan manual dan tradisional (Li et al., 2023). Singkatnya, *e-Government* menawarkan peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada sektor publik dan swasta dengan meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan (Dra. Ihsanira Dhevina E, 2018). *e-Government* juga berperan dalam memanfaatkan teknologi dan informasi guna melayani fungsi bisnis dan berinteraksi dengan publik dan bisnis melalui dukungan teknologi Internet dan saluran elektronik (Alhanatleh et al., 2022).

Selain pemanfaatan *e-government* oleh pemerintah, pemanfaatan *e-government* juga dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat dapat membantu pemerintah melaksanakan kebijakannya. Melalui *e-Government*, pemerintah dapat menyimpan dan menyebarkan data mengenai

kegiatannya. Hal ini memungkinkan warga untuk memantau aktivitas pemerintah. Sistem *E-Government* juga bermanfaat dalam memproses dan menyebarkan informasi terkait pemerintah kepada masyarakat (Alhanatleh et al., 2022). Hal ini juga meningkatkan akuntabilitas figur publik. Selain itu, hal ini juga memberikan sarana untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara ketat oleh pemerintah. Misalnya, terdapat perdebatan mengenai pemblokiran situs keagamaan yang sudah mapan atau kebebasan berpendapat (Uma, 2018). Kemudian untuk fungsi dari *e government* atau *digital government*:

1. Melayani masyarakat. Memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat; Informasi pemerintahan dapat tersedia 24/7 tanpa harus menunggu kantor pemerintah buka. Informasi pemerintahan dapat dicari dan diperoleh di kantor atau rumah tanpa harus pergi ke kantor pemerintahan.
2. Hubungan antara negara, masyarakat dan dunia usaha. Hubungan antara pemerintah, masyarakat dan pelaku ekonomi semakin membaik. Dengan dibukanya diharapkan hubungan antar pihak semakin membaik; Keterbukaan akan menghilangkan rasa ketidakpercayaan antar pihak terhadap pemerintah.
3. Memberdayakan masyarakat melalui informasi. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan informasi yang cukup, masyarakat akan belajar menentukan pilihan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif. Hal tersebut juga terdapat pada konsep digital ekonomi dimana digital ekonomi memiliki fungsi yang signifikan dalam pasar, sehingga digital ekonomi mampu memberdayakan masyarakat (Li et al., 2023).
4. Dengan *e-Government* diharapkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif karena koordinasi pemerintahan dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi informasi. Koordinasi dan diskusi antara pemerintah pusat dan pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa harus berada di satu lokasi (Solokkab, 2021). Selain itu dengan

adanya *E-Government* dapat meningkatkan produktivitas pegawai negeri sipil, karena pegawai negeri sipil mampu dengan mudah melihat permasalahan yang ada di masyarakat(Wushe et al., 2016).

Pemanfaatan teknologi dan informasi di dalam sistem pemerintahan telah berperan penting dalam membantu pemerintah melaksanakan tugasnya. Mulai dari pemerintah terhadap masyarakat atau *Government to citizen*, Kemudian urusan pemerintah dengan swasta dalam menjalin kerja sama atau *Government to bussines*, lalu pemerintah dengan pemerintah dalam menjalin kerja sama atau *Government to Government*, dan yang terakhir *Government to employment*, hubungan pemerintah dengan pegawainya(Nurita, 2016). Sesuai dengan jenis *E-Government* tersebut terdapat point kerja sama antara pemerintah dan pegawainya. Pada masa kini sudah banyak transformasi digital dalam meningkatkan kinerja pegawai pemerintahan dan juga sistem yang mengatur pemerintahan dan juga pegawai pemerintahan (Tangi et al., 2021).

Salah satu transformasi yang dipakai di berbagai pemerintah daerah di Indonesia adalah aplikasi E-Kinerja, yaitu aplikasi database pegawai negeri sipil dan juga aplikasi absensi untuk meningkatkan kinerja pegawai dan kedisiplinan. Aplikasi ini terbukti efektif di dalam meningkatkan kedisiplinan dan juga kinerja dari pegawai negeri sipil, karena di dalam aplikasi tersebut terdapat angka penilaian guna mengukur *reward* dan *punishment* terhadap pegawai negeri sipil (Johanes et al., 2022).

Untuk menjawab peningkatan kedisiplinan pegawai negeri sipil, *digital government/ e-government* ini telah mampu memberikan fungsi di dalam peningkatan kedisiplinan pegawai. *Digital government* atau *e-government* telah menjadi trobosan dalam peningkatan kedisiplinan pegawai negeri sipil, melalui aplikasi aplikasi *database* pegawai negeri sipil dan aplikasi absensi online telah mampu menjawab kecurangan kecurangan di dalam memanipulasi data hadir bagi pegawai negeri sipil(Reninda Dyah Retno Ayu Dewanti, 2022). Tidak hanya itu untuk menilai pegawai negeri sipil kompeten atau tidak di dalam bidangnya atau rajin dalam bekerja,

aplikasi e-kinerja ini sangat mampu dalam memenuhi hal tersebut, walaupun masih ada pengembangan pengembangan dalam aplikasi ini. Berdasarkan penelitian terdahulu, Penerapan aplikasi absensi berbasis online ini sudah diterapkan di berbagai lembaga pemerintah di berbagai daerah di Indonesia. Aplikasi absensi berbasis *online* terbukti memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai negeri sipil di lembaga pemerintah tersebut (Enjeli, 2019).

